

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infrastruktur jalan merupakan salah satu pilar yang utama untuk kesejahteraan umum dan juga sebagai prasarana mendasar untuk pelayanan umum dan juga pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai suatu bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah supaya terwujud hubungan antar pusat dari kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Bidang pembangunan jalan dan jembatan memiliki banyak tugas yang diembannya, yang salah satunya yaitu melaksanakan persiapan rencana kerja pengendalian, pengawasan, juga pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam menunjang keberlangsungan bidang ekonomi dalam rangka pengontribusian produksi masyarakat di setiap daerah atau wilayah. Pembangunan infrastruktur ini juga tidak bisa dilakukan dalam satu tahapan saja atau hanya pada saat pembangunannya saja, akan tetapi harus didukung juga dengan pemantauan dan pemeliharaan berkelanjutan. Hal ini tentu tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, terdapat tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

Perencanaan diperlukan agar pengambilan keputusan suatu kebijakan berjalan dengan baik, dalam hal ini perencanaan anggaran menjadi salah satu aspek penting yang harus dilakukan setiap instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat laporan keuangan. Laporan keuangan awalnya merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan instansi atau perusahaan, dikarenakan laporan keuangan merupakan bentuk gambaran dari transaksi maupun peristiwa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Laporan keuangan juga menjadi sumber informasi untuk pemerintah. Laporan keuangan ini biasanya disajikan pada waktu sekurang-kurangnya satu periode yang dihitung dalam hitungan satu tahun. Laporan keuangan juga berguna untuk menyajikan informasi posisi keuangan, realisasi anggaran arus kas juga kinerja suatu entitas laporan keuangan yang sangat berguna untuk pengguna dalam membuat dan mengevaluasi kebijakan atau keputusan berkaitan dengan alokasi sumber daya secara terperinci (Ramli, 2016). Selain itu laporan keuangan juga dapat memberikan informasi berguna bagi pembuat keputusan juga sebagai akuntabilitas sumber daya yang telah diberikan.

Laporan keuangan mengambil kebijakan mengenai pencapaian kinerja program dan aktifitas realisasi penyerapan biaya. Negara kita yang menerapkan sistem kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan daerahnya atau yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah, menjadi masalah bagi pengelolaan keuangan daerah yang menjadi perhatian bagi pengambil keputusan dalam lingkup pemerintah baik pusat maupun daerah. Maka dari itu saat reformasi, pemerintah telah melakukan upaya untuk

memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang ada, selain itu pemerintah juga melakukan upaya akomodasi aspirasi yang berkembang pada daerah dalam rangka mengupayakan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

Realisasi anggaran merupakan salah satu dari beberapa laporan pada laporan keuangan, merupakan laporan keuangan dengan memberikan gambaran untuk perbandingan antara anggaran dan juga realisasinya dalam satu periode anggaran yang telah ditetapkan. Pelaporan yang dilakukan dalam rangka menunjukkan akuntabilitas juga ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Jadi laporan realisasi anggaran memaparkan pendapatan, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, dan juga sisa dari pembiayaan anggaran pada suatu pemerintahan daerah. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran tidak akan terjadi dengan sedemikian sempurna dan merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh sumber daya manusia pada ahli bidang tertentu untuk mewujudkan keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan anggaran dengan realisasinya tersebut.

Berdasarkan informasi yang terdapat pada laporan realisasi anggaran, pembaca laporan keuangan dapat membuat analisis kinerja belanja daerah, yang diantaranya: analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, rasio efisiensi belanja, rasio belanja terhadap PDRB, dan sebagainya. Begitu halnya dengan data realisasi anggaran yang terdapat pada Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Provinsi UPTD wilayah pelayanan IV selama tiga periode yaitu tahun 2020-2022, menunjukkan nominal anggaran dan realisasi serta persentasenya yang dapat dijadikan sebagai data awal dari

permasalahan untuk dibuat dan ditentukannya analisis kinerja belanja daerah, laporan tersebut dimuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Laporan Capaian Kinerja Program/Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020-2022 DBMPPR Provinsi Jawa Barat

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
2020	45.324.461.189	44.724.536.675	98.68
2021	139.778.867.968	114.165.892.661	81.68
2022	188.149.106.641	186.274.556.530	99.00

Sumber: Laporan Kinerja UPTD IV 2020-2022

Realisasi anggaran yang dicapai dari anggaran setiap bulannya pada tahun 2020 relatif naik, dimana dalam data yang diberikan oleh pengelolaan jalan dan jembatan Provinsi UPTD wilayah pelayanan IV berupa laporan kinerja 2020 menunjukkan anggaran belanja secara keseluruhan sudah dijalankan dengan anggaran yang naik turun dari awal hingga akhir tahun dan realisasi anggaran kegiatan terus naik persentasenya setiap bulan. Namun persentase realisasi anggaran rata-rata masih di bawah 50%. Hal ini disebabkan kurang optimalnya proses perencanaan dan lemahnya penyerapan anggaran dilihat dari tidak terserapnya anggaran dengan baik sehingga pencapaiannya tidak maksimal.

Terdapat kesamaan dengan laporan kinerja 2021, tahun anggaran 2021 menunjukkan hasil persentase dari realisasi anggaran lebih kecil dari tahun sebelumnya, dimana setiap bulannya persentase anggaran tidak melebihi 50% dari anggarannya, namun pada bulan terakhir persentase mencapai 81,68 dari anggarannya.

Nilai anggaran dari data pada tahun 2022 lebih besar dan relatif sama setiap bulannya dibandingkan tahun 2020, persentase realisasi anggarannya pun lebih besar dibanding dua tahun sebelumnya, menandakan penyerapan anggaran yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Selain itu, setiap awal tahun tidak terdapat data realisasi anggaran yang digunakan pada Pengelolaan Jalan dan Jembatan UPTD IV ini, berbeda dengan tahun 2022 yang menunjukkan bahwa realisasi anggaran relatif naik dan normal dari dua tahun sebelumnya.

Peneliti juga menemukan perbedaan dalam realisasi belanja operasi dan belanja modal yang terdapat pada data realisasi belanja modal dan realisasi belanja operasi pada pengelolaan jalan dan jembatan UPTD wilayah pelayanan IV yang telah peneliti olah berdasarkan data dari laporan capaian kinerja program atau kegiatan satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2020-2022 DBMPR Provinsi Jawa Barat, dimana pada tahun anggaran 2020 realisasi belanja operasi lebih mendominasi dari realisasi belanja modal yaitu Rp. 43.441.062.637 atau sekitar 97,13%, namun pada tahun anggaran 2021-2022 sebaliknya dimana realisasi belanja modal lebih mendominasi dari realisasi belanja operasi pada tahun 2021 yaitu Rp. 69.241.201.385 atau sekitar 60,63% dan pada tahun 2022 yaitu Rp. 157.190.165.652 atau sekitar 84,39%, hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dimana pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu sekitar 60-90% yang dijelaskan dalam buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, hal ini menunjukkan tidak adanya keserasian belanja. (Mahmudi, 2016:162)

Peneliti melihat bahwa sebagian besar anggaran pada tahun 2020 dan 2021 tidak terealisasi dengan baik, namun pada akhir tahun ketika anggaran menurun justru realisasi anggaran yang dicapai sudah baik, hal tersebut menjadi suatu kendala dalam penyerapan anggaran dimana belum dapat dikatakan efektif dan efisiennya pengelolaan keuangan yang disebabkan kualitas dan kuantitas perencanaan yang masih lemah, hal ini dapat berpengaruh pula terhadap kinerja yang diberikan pada kantor pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan IV. Jika perencanaan awal dibuat efektif dan efisien maka hasil akhir dari akuntabilitas kinerja instansi dapat dinilai baik pula.

Setelah menemukan permasalahan dalam pengelolaan anggaran pada pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan IV, penulis berupaya melakukan penelitian karena dirasa pentingnya untuk melakukan analisis laporan keuangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada guna mengetahui kebenarannya pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pengelolaan Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Pelayanan IV. Dari permasalahan-permasalahan yang terdapat di atas menunjukkan bahwa belum optimalnya pengelolaan keuangan sehingga berdampak pada kinerja keuangan yang dinilai belum baik. Dalam rangka ketertarikan peneliti, maka dibuatlah penelitian dengan judul “Analsisi Belanja Daerah Pada Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Provinsi UPTD Wilayah Pelayanan IV (Kab. Garut, Kab. Sumedang)”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV belum optimal dalam penyerapan anggarannya, dilihat dari laporan kinerja pada tahun 2021 yang menunjukkan realisasi anggaran belanja daerah dengan persentase masih di bawah 90% yaitu sekitar 81.68%.
2. Pada tahun 2021-2022 tidak ada keserasian belanja yang ditunjukkan dengan realisasi belanja modal yang lebih mendominasi total belanja daerah pada Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, selain itu penurunan realisasi anggaran pada tahun 2021, dimana anggaran mengalami kenaikan dan relatif stabil sedangkan realisasinya menurun dibanding tahun 2020.
3. Proses perencanaan dari belanja modal dan belanja operasi masih belum memenuhi proporsi pada umumnya dimana belanja modal terhadap total belanja daerah antara 5-20 persen dan belanja operasi terhadap total belanja daerah antara 60-90 persen. Penyerapan anggarannya pun masih lemah, dilihat dari tidak terserapnya dengan baik anggaran yang ada pada tahun 2021 sehingga pencapaiannya tidak maksimal, hal ini juga berdampak bagi kinerja keuangan yang dinilai belum optimal.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana analisis varians belanja pada pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan IV?
2. Bagaimana analisis pertumbuhan belanja pada pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan IV?
3. Bagaimana analisis keserasian belanja pada pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan IV?
4. Bagaimana rasio efisiensi belanja pada pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan IV?

D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Mengetahui analisis varians belanja pada pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan IV.
2. Mengetahui analisis pertumbuhan belanja pada pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan IV.
3. Mengetahui analisis keserasian belanja pada pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan IV.
4. Mengetahui rasio efisiensi belanja pada pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan IV.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dalam ilmu pengetahuan juga dalam praktik yang bersangkutan dengan pelaksanaan administrasi khususnya keuangan publik.

1. Manfaat Teoritis

Merupakan harapan peneliti untuk hasil penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan teori keilmuan dalam pengetahuan juga penelitian selanjutnya dari hasil analisis juga teori yang ada pada penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, berharap penelitian ini adalah langkah peneliti dalam menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan dalam hal menganalisis belanja daerah pada sektor publik, juga dapat diterapkan dalam situasi dan waktu yang diperlukan.
- b. Bagi Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan IV, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kebijakan dalam mewujudkan tujuan dari dinas sektor publik yang bersangkutan untuk kedepannya.
- c. Bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan penelitian kedepannya dalam mengembangkan teori keilmuan khususnya jurusan Administrasi Publik dalam membuat karya ilmiah.

- d. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini memberi pandangan tentang bagaimana membuat analisis belanja yang optimal dan bernilai baik pada bidang keuangan dalam lingkup administrasi publik.

F. Kerangka Pemikiran

Belanja daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan semua pengeluaran yang berasal dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas pada tahun anggaran atau periode bersangkutan dengan tidak memperoleh pembayaran kembali dari pemerintah daerah.

Analisis belanja daerah penting dilakukan untuk dapat mengevaluasi apakah pemerintah daerah sudah memakai APBD dengan ekonomis, efektif, dan efisien atau disebut dengan value for money. Hal ini berkaitan dengan pengertian administrasi publik menurut Harbani Pasolong yang menyebutkan bahwa administrasi publik merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh suatu kelompok orang atau organisasi dengan melaksanakan tugas-tugas dalam pemerintahan untuk memenuhi kepentingan publik dengan cara yang efektif dan efisien. (Mahmudi, 2016:153-154)

Pengukuran sejauh mana pemerintah menggunakan anggaran dengan efisien, tepat sasaran, dan menghindari pengeluaran yang tidak diperukan. Dengan digunakannya sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat melakukan efisiensi atas setiap belanja harus dilakukan oleh pegawai pemerintha daerah. Dalam membuat analisis anggaran terkhusus analisis belanja dapat dibuat berdasarkan informasi yang tersedia di Laporan Realisasi

Anggaran dengan memuat empat perhitungan yaitu: analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja. (Mahmudi, 2016:154).

Analisis varians ini merupakan analisis atas selisih atau perbedaan antara anggaran dan realisasi belanja, besaran varians anggaran belanja dengan realisasinya dapat diketahui secara langsung berdasarkan penyajian laporan realisasi anggaran dengan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal ataupun presentase. Varians belanja dinilai baik apabila realisasi belanja lebih kurang sama dengan anggaran belanja, dan dinilai kurang baik apabila realisasi belanja lebih besar dari anggaran belanja. Analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing dari pertumbuhan belanja, dan apakah pertumbuhan tersebut rasional juga dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria analisis pertumbuhan belanja dikatakan naik apabila ukurannya positif, dan dikatakan turun apabila ukurannya negatif. Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Fungsi anggaran dapat berjalan dengan baik, pemerintah perlu membuat harmonisasi belanja, diantara analisis keserasian belanja diantaranya ada: Analisis belanja operasi terhadap total belanja; dan analisis belanja modal terhadap total belanja. Belanja operasi memiliki ketentuan porsi pada umumnya yaitu antara 60% sampai dengan 90 % dari total belanja daerah atau dapat dikatakan mendominasi dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal pada umumnya memiliki porsi 5% sampai dengan 20% dari total belanja daerah atau dapat dikatakan tidak mendominasi dari total belanja daerah. Rasio efisiensi belanja yaitu

perbandingan diantara realisasi belanja dengan anggaran belanja, rasio ini dipakai untuk pengukuran tingkat hematnya anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. dinilai efisien anggarannya apabila rasio efisiensinya kurang dari 100%, apabila lebih maka dinilai adanya pemborosan anggaran. (Mahmudi, 2016:155-164)

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Diolah Peneliti, 2023